

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* PADA DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN DI KABUPATEN GOWA

Nyai Kurnia Wati^{1*)}, Ismail²⁾, Herlina Sakawati³⁾, Dahlan⁴⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum
Universitas Negeri Makassar

⁴⁾ Prodi Administrasi Publik, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak Papua
Email: nkurniaw2@gmail.com*)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan *Electronic Government* pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis model interaktif yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan pengujian kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan *Electronic Government* pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa telah berjalan dengan baik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward III dengan indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan keempat indikator tersebut indikator disposisi masih kurang baik yaitu terlihat dari kebutuhan analisa permintaan disposisi jabatan yang belum tercapai serta pemberian insentif berupa reward yang belum direalisasikan.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; *Electronic Government*.

PENDAHULUAN

Globalisasi masuknya pemikiran, gaya hidup, informasi, dan teknologi dalam ruang lingkup kehidupan manusia membawa berbagai dampak, termasuk dampak teknologi pemerintahan berbasis digital online, dikenal dengan sistem *Electronic government (e-gov)*. *E-gov* merupakan sistem penataan kerja pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mensurvei pemerinkatan *e-gov* dari seluruh dunia yang diumumkan setiap dua tahun sekali, menyebutkan bahwa Negara Indonesia menunjukan geliat kemajuan yang cukup baik dari tahun sebelumnya.

Peningkatan ini dapat menjadi kabar baik untuk kemajuan sistem *e-gov* di Indonesia

United Nations (UN) E-Government Survey 2020 menempatkan Negara Indonesia pada peringkat 88 dari 193 negara secara global atas pelaksanaan dan pengembangan *e-gov* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan cetakan poin 0.6612 dalam grup *High E-Government Development Index (EGDI)*. Indonesia masuk pada 100 besar peringkat dunia secara global yang juga disejajarkan dengan jajaran negara maju di dunia seperti Estonia, Denmark, Jerman, Korea, Amerika Serikat, Cina, Australia, Jepang dan seluruh negara yang tergabung lainnya dalam perolehan *Open Government Data Index* terbaik.

Penataan *e-gov* di Indonesia dapat dilihat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembanagan *Electronic Government*. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang berperinsip *good governance*. Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini menggunakan teknologi *e-gov* untuk mengatur dan menjalankan tugas otonomi daerah agar lebih efektif dan efisien. Melalui Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Penyelenggaraan

Pembangunan dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian diharapkan akan mampu menghubungkan wilayah Kabupaten Gowa sebagai satu kesatuan dalam pendistribusian informasi yang menyeluruh, akan tetapi penerapan *e-gov* dalam Kajian Dewan Teknologi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) menunjukan beberapa permasalahan penghambat perkembangan *e-gov* di Indonesia yaitu visi TIK yang belum terpadu, regulasi dan kebijakan TIK belum lengkap, pengembangan industri TIK masih belum maksimal, koordinasi yang masih lemah, infrastruktur, data dan aplikasi belum terintegrasi, sumber daya manusia (SDM) TIK masih terbatas, konten lokal TIK masih belum terpenuhi, dan keamanan TIK yang masih mengancam. (Gdodp & Masyhur, 2014)

Data dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2016-2021 Kabupaten Gowa menyebutkan bahwa Penggunaan teknologi informasi sistem informasi dan manajemen serta *e-gov* belum diterapkan secara terintegrasi dan komprehensif. Upaya penyelenggaraan pemerintah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme masih perlu ditinjau kembali

demis terealisasinya pemerintahan yang transparan, efektif, produktif, akuntabel, dan bersih.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Guntur dan Andi Aslinda dalam judul jurnal Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Terhadap Pengaruh Globalisasi tahun 2016, memperoleh hasil kesimpulan akhir yaitu Kebijakan Nasional Negara Indonesia dalam regulasi yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, menyatakan bahwa usaha pemerintah dalam mengembangkan pendidikan berkarakter masih dalam tantangan globalisasi, olehnya seluruh pihak perlu berkontribusi dalam mewujudkan program pendukung terciptanya pendidikan indonesia yang lebih mumpuni.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Nasrullah dalam judul jurnal Implementasi *Electronic Government* dalam Mewujudkan *Good Governance* dan *Smart City* (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar) tahun 2017, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif memperoleh hasil penelitian bahwa peran *e-gov* dalam mewujudkan *good governance* dapat memberikan dampak positif adapun kelemahan dan hambatan yang terjadi merupakan hal yang masih wajar karena *e-gov* di Kota Makassar masih terbilang baru sehingga perlu dilakukan perbaikan secara berkala.

Dalam bahasan judul penelitian terdahulu yang telah di paparkan, terdapat penjelasan mengenai Implementasi Kebijakan, dan *E-gov* dengan berbagai aspek keberhasilan dan hambatan implementasi, akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan khusus yakni Implementasi Kebijakan *Elektronik Government* Pada Dinas Kominfo Statistik

dan Persandian di Kabupaten Gowa sehingga diperoleh kebaruan yaitu dari segi lokus dan fokus penelitian, tahun penelitian, dimensi penelitian, dan teori penelitian yang digunakan.

Konsep Kebijakan Publik

Easton (Taufiqurokhman, 2014) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *The authoritative allocation of values for the whole* atau dalam terjemahannya merupakan pengalokasian pokok-pokok nilai kepada keseluruhan aliansi masyarakat secara merata untuk dikerjakan yang dalam artian adalah secara paksa.

Woll (Abdal, 2015) memberikan definisi kebijakan publik sebagai sejumlah kegiatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat baik secara langsung maupun melalui organisasi yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

David Easton (Anggara, 2014) memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara legal kepada seluruh anggota masyarakat.

Dari berbagai pandangan mengenai definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat di analisa bahwa, kebijakan publik merupakan penggambaran dari sikap pemerintah untuk menghasilkan regulasi terbaik dalam mencapai suatu kepentingan publik.

Konsep Implementasi Publik

Warwick (Handoyo, 2012) memberikan definisi Implementasi Publik sebagai usaha/transaksi sumber daya.

Horn (Pramono, 2020) memberikan definisi implemtasi publik sebagai sikap atau perilaku yang dikerjakan oleh perorangan, kelompok, administratif penguasa negara

atau swasta yang diarahkan pada sesuatu yang didapatkan dalam rencana strategis regulasi yang telah ditetapkan.

Lane (Akib, 2010), memberikan definisi implementasi publik sebagai suatu konsep yang dapat dibagi dua makna yakni implemtasi merupakan sinonim fungsi dari *output* dan *outcome*.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli mengenai implementasi publik yang telah dipaparkan maka kesimpulan yang dapat di analisa bahwa, implementasi publik adalah suatu proses pelaksanaan aktivitas kebijakan oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang telah direncanakan terdahulu untuk mencapai suatu keinginan tertentu.

Teori Implementasi Kebijakan Publik Generasi I (*Top Down*)

George C. Edwards III (Subianto, 2020) dalam teorinya mengemukakan dua pertanyaan pokok mengenai prasyarat bagi implementasi yang berhasil dan penghambat utama terhadap keberhasilan implementasi, maka dirumuskanlah empat indikator yang merupakan syarat penting berhasilnya implementasi yaitu:

- a) Komunikasi, Implementasi kebijakan publik dapat dicapai dengan bentuk penyaluran komunikasi yang tepat kepada para pelaksana kebijakan sebagai bentuk arahan terhadap tugas yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dari atasan untuk dapat bekerja secara baik maka komunikasi yang dijalin antara atasan dan para pelaksana kebijakan harus terspesifikasi agar dapat di implementasikan secara tersusun dan sistematis. Indikator komunikasi ada tiga, yaitu dipaparkan sebagai berikut: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

- b) Sumber Daya, Implementasi kebijakan publik memerlukan sumber energi penunjang yang cukup untuk menopang keberhasilan implementasi, sumber daya yang dimaksudkan ialah kualitas manusia, metode, dan material yang baik. Sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan, terdiri atas empat indikator yaitu: Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.
- c) Disposisi, Penempatan jabatan atau tugas implementasi kebijakan publik hendaknya didukung oleh sikap para pelaksana kebijakan yang berkarakter, komunikatif, demokratis, cerdik, dan jujur. Terdapat dua indikator disposisi, yaitu: Pengangkatan petugas dan Pemberian intensif (*reward*).
- d) Struktur Birokrasi, dalam peta sederhana implementasi kebijakan publik struktur birokrasi dijelaskan dengan penjabaran fungsi kinerja para pelaksana kebijakan yang bersifat resmi/formal yang berhierarki menurut tugas dan fungsi regulasi yang ada.

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Subianto, 2020) mengemukakan teorinya bahwa implementasi kebijakan publik adalah unsur berharga dari penganalisisan dengan mempertimbangkan indikator yang berpengaruh pada keberhasilan sasaran utama pada keseluruhan perjalanan implementasi kebijakan publik. Indikator implementasi kebijakan publik tersebut, adalah:

- a) Tingkat kesulitan dan kemudahan masalah untuk di *handle*,
- b) Keberhasilan kebijakan dalam menyusun proses implementasi secara efektif, dan
- c) Variabel lingkungan diluar regulasi.

Van Meter dan Van Horn (Subianto, 2020) dalam memberikan teori implementasi kebijakan berusaha untuk mengungkapkan antara pokok pikiran kebijakan dengan implemenasi dan bentuk pemikiran yang menjembatani regulasi dan pertunjukan (pelaksanaan). Ada 5 indikator teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu:

- a) Skala dan sasaran kebijakan,
- b) Energi penunjang Kebijakan,
- c) Karakteristik birokrasi atau petugas instansi,
- d) Koordinasi antar birokrasi, dan
- e) Lingkungan eksternal birokrasi (Sosial, ekonomi dan politik).

Berdasarkan konsep teori implementasi kebijakan publik dari beberapa para ahli maka kesimpulan yang dapat di analisa bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses pengukuran menggunakan indikator berdasarkan teori dari para ahli kebijakan publik untuk mengetahui berjalannya implementasi kebijakan publik dari suatu kebijakan/program.

Konsep *Electronic Government* pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan dan menjalankan transformasi digital *e-gov* sebagai upaya *transformational government* atau transformasi digital pemerintahan. *E-gov* diimplementasikan pada seluruh tingkatan pemerintahan untuk menjalankan asas demokratis.

Asas penyelenggaraan kebijakan *e-gov* berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Penciptaan tujuan *good governance* atau pemberantasan patologi birokrasi di daerah Kabupaten

Gowa menjadi sasaran utama untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dimensi *Electronic Government*

Kementerian Komunikasi dan Informatika merumuskan lima dimensi *egov* dalam PeGI (Pemeringkatan *Electronic Government* Indonesia) yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan (Hernikawati, 2013), sebagai berikut:

- a) Dimensi Kebijakan sebagai landasan awal dari implementasi *egov*. Pada dimensi ini, kebijakan dilakukan dengan cara mengatur kebijakan, visi dan misi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan pembuktian surat keputusan, peraturan, kebijakan, atau rencana strategis yang diikuti sertakan.
- b) Dimensi kelembagaan adalah penampung aspirasi unit kerja atau organisasi yang ada untuk dapat bertanggung jawab dalam pelaksanaan *e-gov*, yaitu berkaitan dengan struktur organisasi, dokumen tugas dan fungsi unit kerja, ketersediaan sistem dan aturan yang terdokumentasi secara menyeluruh, dan ketersediaan energi yang sesuai dengan kebutuhan Sumberdaya manusia TIK.
- c) Dimensi Infrastruktur sarana dan prasarana teknologi informasi adalah faktor pendukung sumberdaya dalam kesuksesan *e-gov*. Dimensi infrastruktur menyangkut ketersediaan data *center* dan aplikasi penunjang layanan komunikasi (*Local Area Network*, *Wide Area Network*, *Internet*), aksesibilitas, ketersediaan fasilitas, data *disaster recovery* jika sistem mengalami gangguan, instrumen perawatan infrastruktur dan pendataan fasilitas TIK.

- d) Dimensi Aplikasi adalah ketersediaan perangkat lunak sebagai sistem pendukung layanan *e-gov* baik secara langsung maupun virtual.
- e) Dimensi Perencanaan merupakan persiapan manajemen TIK secara investigatif dan tetap diberlakukan. Dimensi ini meramu segala bentuk pengorganisasian, instrumen tata kelola, arsip *master plan* (lima variabel dimensi *e-gov*), implementasi *master plan* dan penganggaran.

Kerangka Konsep

Pada Pelaksanaan kebijakan dari pusat ke daerah, *e-gov* Kabupaten Gowa diatur dalam delegasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah. Regulasi dan sumber daya pendukung kebijakan perlu dipersiapkan untuk menopang keberhasilan implementasi yang diinginkan. Konsep Implementasi yang sangat mendominasi dalam hal ini, yaitu konsep bersifat *Top Down*, Maka teori yang relevan digunakan adalah teori dari George C. Edward III yang memiliki empat indikator khusus diantaranya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi untuk mengidentifikasi keberhasilan implementasi *e-gov* pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa, yang akan dibahas menggunakan empat Dimensi *E-gov* yaitu Dimensi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, dan Perencanaan, sedangkan dimensi aplikasi tidak lagi dicantumkan untuk dibahas karena telah termaktub maknanya pada dimensi infrastruktur.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan data deskriptif. Jenis penelitian ini

tepat digunakan karena bersifat survey atau terjun langsung. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata tertulis, uraian yang diperoleh dari responden, dan perilaku subjek yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan *e-gov* pada dinas kominfo statistik dan persandian di kabupaten gowa berdasarkan teori dari George C. Edward III, sebagai berikut:

1) Komunikasi

Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa telah memenuhi syarat dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi Kebijakan *Egov* dengan baik. Berbagai upaya yang dilakukan dalam akses penyaluran komunikasi melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis *Electronic*) disampaikan dengan sangat jelas dari setiap butir kebijakan serta visi misi bupati terpilih dan tugas pembantuan yang diwewenangkan kepada dinas kominfo statistik dan persandian. Hal ini menjadikan indikator komunikasi dalam delegasi wewenang kebijakan *e-gov* menjadi faktor yang berhasil untuk diimplementasikan.

Keberhasilan indikator komunikasi dapat dilihat dari transmisi yang berjalan dengan alur yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan tujuan dari bupati terpilih. Kejelasan visi misi yang hendak dicapai dari adanya kebijakan *e-gov* juga tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sehingga konsistensi kebijakan *e-gov* dapat

dipantau dari alur yang telah disusun dan ditargetkan sesuai waktu yang ditentukan.

2) Sumberdaya

Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa, diperoleh bahwa implementasi kebijakan *e-gov* telah memenuhi dimensi informasi, wewenang dan fasilitas namun pada dimensi sumberdaya staf masih belum maksimal. Implementasi Kebijakan *E-gov* yang dilaksanakan telah sesuai dengan delegasi perintah tugas pembantuan terhadap bupati terpilih akan tetapi keterbatasan staf menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memperoleh kinerja yang lebih stabil. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan pendapatan asli daerah yang masih rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan analisa staf dinas kominfo statistik dan persandian masih dibatasi.

Dimensi informasi menjadi hal yang cukup baik dalam implementasinya yaitu didukung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang menjadi pedoman informasi kebijakan *e-gov*. Pada dimensi wewenang yang dijalankan oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian dilakukan berdasarkan persetujuan kepala dinas sehingga pemegang erat wewenang masih dijalankan sesuai tugas dan fungsi yang limpahkan yaitu perizinan akan menjadi legal jika melalui tahapan persetujuan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian begitupun sebaliknya. Dimensi fasilitas berdasarkan menjadi hal yang cukup memadai dalam kebijakan *e-gov* di Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa ditandai dengan kemajuan dalam operasi pembuatan jejaring sosial aplikasi yang memfasilitasi kebijakan *e-gov* seperti aplikasi disposisi online dan lain sebagainya.

3) Disposisi

Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa, dalam memenuhi dimensi pengangkatan birokrat dan pemberian intensif belum dilaksanakan dengan baik. Adapun pengangkatan birokrat masih dilatar belakangi oleh faktor pendapatan asli daerah yang rendah sehingga alokasi dana perlu dipertimbangkan agar tidak defisit. Alokasi pendapatan asli daerah masih difokuskan terhadap keperluan medis untuk menangani *covid-19*. Pemberian intensif dilakukan dengan memberikan tunjangan kinerja dalam hal ini pemberian intensif bukan dinilai dari seberapa banyak jumlah nominalnya akan tetapi Hal-hal berupa *reward* masih belum dilakukan selain dilatar belakangi oleh pendapatan asli daerah yang masih rendah juga dilakukan untuk menyelamatkan pegawai yang dinilai kurang aktif sehingga pegawai yang berprestasi kurang mendapat apresiasi dan pegawai yang dinilai kurang aktif tidak mendapatkan *punishment* yang jelas.

Dimensi pengangkatan birokrat dilakukan oleh daerah tingkat I atau daerah pusat yang dalam hal ini bersifat *top down* (Kebijakan dari atas ke bawah). Pada dimensi ini permintaan anggota yang perlukan masih belum terpenuhi pada Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian sehingga kendala masih ditemukan yaitu adanya kekosongan jabatan pada bidang tertentu (Bidang Persandian) hal tersebut terjadi karena masa pensiun, pada dasarnya masa pensiun telah di tetapkan dengan pasti yaitu diumur yang telah ditentukan, sehingga persiapan masuknya anggota baru untuk mengisi jabatan seharusnya sudah diperhitungkan sehingga tidak menimbulkan kekosongan jabatan.

4) Struktur Birokrasi

Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten Gowa bahwa dalam melaksanakan kebijakan *e-gov* Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah di implementasikan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kabupaten Gowa.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan *Electronic Government* pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten gowa, berdasarkan teori George C. Edward III yang memuat indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Kebijakan *Electronic Government* pada Dinas Kominfo Statistik dan Persandian di Kabupaten gowa telah berjalan/terimplementasi dengan baik. Keberhasilan indikator komunikasi dapat dilihat dari dimensi transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi yang berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja sesuai tujuan dan visi misi bupati terpilih. Indikator Sumberdaya melalui pemenuhan staf belum mencapai target yang dibutuhkan, pada dimensi informasi, wewenang, dan fasilitas telah berjalan dengan baik yaitu merujuk pada pedoman regulasi, sikap tegas Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian dalam menyikapi perizinan penerbitan layanan aplikasi, dan fasilitas yang memadai

kebijakan. Pada indikator disposisi belum berjalan dengan baik merujuk pada pengangkatan birokrat yang belum memenuhi permintaan dan pemberian insentif berupa *reward* sebagai motivasi kinerja belum dilakukan. Pada Indikator Struktur Birokrasi implementasi telah berjalan dengan baik yaitu merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kabupaten Gowa yang telah memuat hierarki jabatan yang sesuai.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dipaparkan yaitu dalam menjalankan implementasi kebijakan *e-gov* di kabupaten gowa, pihak dinas perlu mengadakan pelatihan lebih intensif terhadap analisa pekerjaan, hal ini didasari oleh jumlah staf yang masih belum memadai. Jumlah staf dapat mempengaruhi kinerja akan tetapi jumlah tidak selamanya menjadi tolak ukur keberhasilan dalam sebuah kebijakan melainkan kualitas dari pemahaman dalam menjalankan tugas serta kesadaran pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Abdoellah, A. Y. Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. In *Alfabeta* Bandung (pp. 71–74). Alfabeta
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID> implementasikebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Cv Pustaka Setia.
- Guntur, M., & Aslinda, A. (1967). Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Terhadap Pengaruh Globalisasi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 231–238.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya Semarang.
- Hernikawati, D. (2013). Pengelompokan Implementasi *E-Government* Tingkat Provinsi dengan Analisis Klaster Egovernment Implementation Grouping in Provincial Level with Cluster Analysis. *Iptek-Kom*, 15(1), 63–74.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan *EGovernment*.
- Khaidir, A. 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasinya Dalam Bidang Pendidikan*. Padang: Margaret Suttion.
- Masyhur, F. (2014). Kesiapan *E – Skills* Pemerintah Daerah dalam Implementasi *E-Government* di Kawasan. *Jurnal Pekomas*, 17(3), 151–160.
- Miles, M. B, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Ed. 3. USA: Sage Publication.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik* (2nd ed.,

- pp. 5–4). PT Leutika Nouvalitera. https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NWNlNmU0YzM0YWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf
- Nasrullah. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret Perss.
- Nur, Andi Cudai. 2018. *Peran Dan Tataan Kebijakan Publik*. Gowa Sulawesi Selatan: Agma.
- Nurul Istiqamah Muis. 2021. Implementasi Program *E-Billing* Direktorat Jendral Pajak Online di Kantor Perpajakan Kabupaten Enrekang. Universitas Negeri Makassar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kabupaten Gowa.
- Pramono, J. 2020. *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.)). Surakarta: UNISRI Press.
- Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Gowa 2017-2021.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi*. In *Brilliant* (1st ed.). PT Menuju Insan Cemerlang. http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/KebijakanPublik_151220_opt.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tachja, H. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik*. Hakim Publishing Cimahi Jawa Barat.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik dan Good Governancy*. Universitas Negeri Gorontalo Medio.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Website

Website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Hasil Survei PBB, Egovernment Indonesia: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30024/hasil-survei-pbb-egovernment-indonesia-naik-peringkat>